

## ► PEMBAYARAN PAJAK

# Luncurkan Sistem Digital, Bantul Targetkan PAD Rp730 Miliar

**P**emerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah dan e-retribusi berbasis digital melalui *virtual account* dan aplikasi dalam acara *High Level Meeting* bertajuk *Peluncuran Pembayaran Pajak Daerah Digital dan Apresiasi Wajib Pajak Panutan PBB*, Rabu (7/5).

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan digitalisasi sistem pajak ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah. "Semakin besar penerimaan pajak daerah, semakin luas kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Menurut Halim, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantul tahun 2025 mencapai Rp730 miliar, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. "Tahun 2026 kami proyeksikan APBD bisa tembus Rp2,5 triliun. Maka intensifikasi pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah harus ditingkatkan," ungkapnya.

Ia juga menekankan korelasi langsung antara kualitas infrastruktur yang dibangun, salah satunya lewat pajak, dan peningkatan investasi lokal. "Kami bangun jalan desa, aspalnya bagus, langsung tumbuh warung bakso, *soto*, tukang cukur. Itu investasi mikro yang nyata," jelasnya.

Selain itu, program pembangunan

instalasi air bersih juga terus digencarkan untuk mengatasi krisis air di beberapa desa.

"Jadi kami menjamin seluruh wajib pajak, satu rupiah pun yang bapak ibu bayarkan akan kami pertanggungjawabkan untuk pembangunan Kabupaten Bantul sebaik mungkin dan seoptimal mungkin," jelasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istiril Widilastuti, menyatakan kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi metode pembayaran pajak secara digital. "Kami ingin mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Masyarakat bisa membayar pajak

lewat QRIS, transfer bank, dan kanal elektronik lainnya," katanya.

Istiril menambahkan, lewat program ini sekarang pembayaran sejumlah retribusi yang ada di Bantul bisa dijangka via QRIS. "Untuk retribusi kios pasar, terminal dan rusunawa sudah bisa dilakukan secara digital," jelas Istiril.

Untuk tahun 2025, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang telah ditetapkan sebanyak 636.410 dengan pokok ketetapan mencapai Rp79,2 miliar. Dengan digitalisasi ini, Pemkab Bantul berharap kepatuhan pajak meningkat dan PAD terus tumbuh demi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. (Yosef Leon/\*)



Harian Jogja/Yosef Leon

**Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih** (*tengah*) didampingi sejumlah pejabat terkait saat meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah dan e-retribusi berbasis digital melalui *virtual account* dan aplikasi, Rabu (7/5).

